

RINGKASAN

Berkembangnya teknologi informasi tentang internet yang semakin pesat maka semakin besar saja kejahatan dalam media internet yang akan timbul. Salah satu kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi adalah prostitusi *online*. Fenomena perkembangan prostitusi menjadi prostitusi *online* akhir-akhir ini kembali menggemparkan tanah air. Terungkapnya satu persatu kasus prostitusi yang melibatkan beberapa artis, semakin memperlihatkan tabir praktek prostitusi yang kian kelam. Pada tahun 2015, dalam kasus prostitusi *online* yang juga melibatkan sejumlah artis, sebagai muncikari Robby Abbas dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 4 bulan sementara PSK dan pengguna bebas dari segala tuntutan. Pada kasus yang sama juga dan menjadi kasus tentang prostitusi *online* yang cukup hangat diberitakan yakni kasus prostitusi *online* yang menjerat artis terkenal di Indonesia yang bernama Vanessa Angel. Vanessa Angel di dakwa dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan alasan Vanessa Angel secara langsung mengeksploitasi dirinya ke muncikari.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *sosio legal research* dengan menggunakan data primer serta sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data disajikan secara sistematis dalam bentuk teks naratif, dan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Kebijakan polresta banyumas dalam penanggulangan prostitusi *online* menggunakan kebijakan penal dan kebijakan non penal. Kebijakan polresta banyumas dalam penanggulangan prostitusi *online* menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*) dengan upaya Pre-emptif yaitu upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang dan upaya preventif yaitu tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Kebijakan polresta banyumas dalam penanggulangan prostitusi *online* menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dengan upaya represif yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Putusan Polresta Banyumas memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum dalam upaya penegakan tindak pidana prostitusi *online* baik berdampak positif maupun negatif terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, faktor budaya, penguasaan teknologi yang masih kurang, dan kurangnya komitmen penegak hukum dalam menanggulangi prostitusi *online*.

Kata Kunci : Kebijakan Kriminal; Polresta Banyumas; Prostitusi *Online*.

SUMMARY

The development of information technology about the internet is getting faster, the greater the crime in internet media that will arise. One of the crimes committed by utilizing technological sophistication is online prostitution. The phenomenon of the development of prostitution into online prostitution has recently shocked the country again. The disclosure of prostitution cases one by one involving several artists, increasingly shows the veil of increasingly dark prostitution practices. In 2015, in an online prostitution case that also involved a number of artists, as a pimp Robby Abbas was sentenced to 1 year and 4 months in prison while prostitutes and users were acquitted of all charges. In the same case and a case of online prostitution which is quite hotly reported, namely the case of online prostitution that ensnared a famous artist in Indonesia named Vanessa Angel. Vanessa Angel was charged with Article 27 paragraph (1) of the ITE Law on the grounds that Vanessa Angel directly exploited her to pimp.

This study uses a socio-legal research approach using primary and secondary data with primary, secondary and tertiary legal materials. Data is presented systematically in the form of narrative text, and data analysis is carried out qualitatively.

Based on the results of research and discussion. Banyumas Police Policy in dealing with online prostitution uses a penal policy and a non-penal policy. Banyumas police policy in dealing with online prostitution using facilities outside of criminal law (non-penal policy) with pre-emptive efforts, namely the initial efforts made by the police to prevent the occurrence of criminal acts by instilling good values or norms so that norms can be enforced. the norm is internalized in a person and preventive efforts are follow-up to pre-emptive efforts that are still in the prevention order before the crime occurs. The Banyumas Police's policy in dealing with online prostitution uses the means of criminal law (penal policy) with repressive efforts that are carried out when a crime or crime has occurred whose action is in the form of law enforcement by imposing penalties.

The decision of the Banyumas Police has several factors that can affect the law enforcement process in an effort to enforce online prostitution, both positive and negative impacts lie in the content of these factors. These factors consist of legal factors, law enforcement factors, facilities factors, community factors, cultural factors, lack of mastery of technology, and lack of commitment by law enforcement in tackling online prostitution.

Keywords: Criminal Policy; Banyumas Police Departement; Online Prostitution.